

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI SKPD TAHUN 2018

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Area Perubahan	Program/Kegiatan	Tahapan/Aktifitas	Indikator	Target Indikator Tahun 2018	Target Indikator 2018				Plafon Anggaran	Realisasi Anggaran sampai Triwulan IV	Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan
						Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
1	Pelayanan Publik	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>										
		Kegiatan 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian surat Gubernur ke DPRD tentang Ranperda yang akan dibahas</li> <li>2. Penjadwalan kegiatan pada rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah</li> <li>3. Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar</li> <li>4. Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi</li> <li>5. Rapat Paripurna penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan Umum Fraksi-fraksi</li> <li>6. Pembahasan oleh Komisi terkait atau oleh Badan Musyawarah.</li> </ol>	Jumlah Perda yang disetujui	21	7	6	4	4	24.259.906.007,-	22.248.953.021,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah</li> <li>- Aturan-aturan yang perlu disesuaikan</li> </ul>

			<p>7. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD apabila membahas Renperda Tentang APBD.</p> <p>8. Rapat Paripurna Pengambilan keputusan</p>									
		<p>2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPR</p>	<p>1. Penjadwalan kegiatan pada rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah</p> <p>2. Koordinasi dengan penyelenggara / Perguruan Tinggi untuk pengurusan Rekomendasi ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri</p> <p>3. Rekomendasi dari BPSDM</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan</p> <p>5. Evaluasi</p> <p>6. Tindak lanjut</p>	<p>Jumlah Pimpinan dan Anggota serta Sekretaris DPRD meningkatkan Kapasitas</p>	6	2	-	2	2	4.992.198.808,-	4.629.864.692,-	
		<p>3. Reses</p>	<p>1. Penjadwalan kegiatan pada rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah</p> <p>2. Penyusunan Rencana kegiatan dan proses Administrasi</p> <p>3. Pelaksanaan Reses pada setiap masa persidangan</p> <p>4. Penyampaian hasil reses pada rapat Paripurna pada setiap akhir masa persidangan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti</p>	<p>Jumlah Pelaksanaan Reses</p>	3	1	1	1	-	7.087.259.050,-	6.835.914.660,-	

		4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjadwalan kegiatan di Badan Musyawarah</li> <li>2. Penyusunan Rencana kunjungan kerja dalam daerah</li> <li>3. Pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</li> <li>4. Evaluasi pelaksanaan kunjungan kerja</li> <li>5. Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan</li> </ol>	Jumlah Kunjungan Kerja Anggota DPRD dalam daerah	160 kali	40	40	40	40	6.373.615.900,-	6.275.386.200,-	
		5. Kunjungan kerja pimpinan dan komisi ke luar daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kunjungan kerja pimpinan dan komisi keluar daerah</li> <li>2. Penjadwalan di Badan Musyawarah</li> <li>3. Pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan komisi ke luar daerah</li> <li>4. Evaluasi pelaksanaan kunjungan pimpinan dan komisi keluar daerah</li> <li>5. Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ol>	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan komisi keluar daerah	6 kali	2	2	1	1	15.762.145.739,-	12.431.803.677,-	Adanya pembatalan keberangkatan Anggota DPRD Misalnya : Kunjungan kerja ke Luar Negeri dianggarkan sebanyak 5 orang yang berangkat hanya sebanyak 2 orang
		6. Penyediaan Jasa Pelayanan tamu Pemda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana Penyediaan Jasa pelayanan tamu Pemda</li> <li>2. Pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan tamu Pemda</li> <li>3. Monitoring pelaksanaan</li> </ol>	Persentase penyediaan jasa pelayanan tamu Pemda	100 %	25%	25%	25%	25%	1.769.869.720,-	1.763.974.900,-	

			penyedia jasa pelayanan tamu pemda 4. Evaluasi pelaksanaan penyedia jasa pelayanan tamu pemda 5. Tindak lanjut hasil evaluasi									
		7. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	1. Penyusunan rencana koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan 2. Pelaksanaan koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan 3. Monitoring pelaksanaan koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan 4. Evaluasi pelaksanaan koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan 5. Tindak lanjut hasil evaluasi	Persentase koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	100%	25%	25%	25%	25%	144.080.000,-	128.726.700,-	
		8. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan	1. Penyusunan rencana kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 2. Pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 3. Monitoring pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan terhadap	Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	8	2	2	2	2	169.407.800,-	126.574.700,-	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Evaluasi pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi</li> <li>5. Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>									
		9. Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana seminar dalam rangka pembahasan Ranperda</li> <li>2. Pelaksanaan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda</li> <li>4. Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Jumlah seminar dalam rangka pembahasan Ranperda	2	-	1	-	1	145.174.000,-	143.734.200,-	
		10. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana penyebarluasan informasi pembangunan daerah</li> <li>2. Pelaksanaan penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah</li> <li>3. Monitoring pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan daerah</li> <li>4. Evaluasi pelaksanaan penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah</li> <li>5. Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Jumlah Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	3.256	790	748	854	854	3.041.975.350,-	2.905513.950,-	
		11. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana sosialisasi peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Penjadwalan kegiatan di</li> </ul>	Jumlah Peraturan perundang-undangan	19	5	5	5	4	692.629.000,-	593.746.500,-	Keterbatasan waktu Anggota DPRD dalam melaksanakan

			Badan Musyawarah 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan – undangan 4. Evaluasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan 5. Tindak lanjut hasil evaluasi	Yang akan disosialisasik an					

Padang, 31 Desember 2011

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN R/  
PROVINSI SUMATERA BAF  
  
 H. RAFILS, SH, MM  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640930 1986021002